

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 KESIMPULAN

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini merupakan fenomena sosial yang bersifat *universal* dalam kehidupan manusia. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih. Modus operasi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*). Kejahatan yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja menjadi salah satu kewaspadaan yang harus dilakukan oleh setiap orang di muka bumi ini.

Perkembangan dan kemajuan suatu negara telah membuka celah bagi pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah kelemahan suatu negara dalam fase untuk maju dan berkembang. Aksi kejahatan seringkali terjadi akibat adanya perbedaan pendapat sehingga menjadi perpecahan dan membuat kerusuhan. Perpecahan dan kerusuhan yang terjadi pada suatu wilayah atau negara, tentunya akan sangat merugikan wilayah atau negara tersebut dari segi sosial dan finansial, kemajuan teknologi juga mendorong para pelaku untuk melancarkan aksi-aksinya.

Kawasan Asia Tenggara adalah suatu kawasan yang dinamis, tidak hanya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan, tetapi juga politik. Seiring dengan berkembangnya kawasan Asia Tenggara, tentu setiap anggota negara yang berada di kawasan ini tidak hanya menginginkan perkembangan-perkembangan di dalam bidang

perdagangan dan ekonomi saja, tetapi mereka juga menginginkan suatu rasa aman dari segala hal, yang dapat mengganggu segala aktivitas yang mereka lakukan dan hal yang dapat mengancam kedaulatan mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak kejahatan-kejahatan yang menyerang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina. Berkembangnya arus globalisasi serta kerjasama ekonomi dan kerjasama pertahanan pada suatu negara dengan negara lain melahirkan kesejahteraan bagi suatu negara, selain membawa kesejahteraan juga membawa suatu masalah bagi suatu negara antara lain mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki banyak ragam ras, suku, agama, budaya, bahasa, sumber daya alam yang melimpah, dan tentunya memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke. Indonesia sering di jadikan sebagai tempat wisata yang sangat eksotis bagi para pelancong atau turis-turis yang datang dari luar negeri karena keindahan alam yang disajikan membuat para turis ingin selalu kembali ke Indonesia untuk berlibur. Namun di balik semua keindahan yang dimiliki Indonesia mempunyai masyarakat yang tingkat perekonomiannya yang rendah. Bagi mereka yang tinggal jauh dari daerah pariwisata, perekonomiannya mereka jauh di bawah rata-rata. Jika di tempat pariwisata rata-rata pekerjaan mereka menjadi *tour guide* berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok desa, mereka hanya bekerja sebagai buruh serabutan dan sebagian besar adalah petani. Hal ini membuat Indonesia masih menjadi perekonomian terendah di dunia dan memiliki jumlah populasi yang tinggi di dunia.

Rendahnya perekonomian sebagian masyarakat di Indonesia di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mereka menggunakan orang-orang dengan penghasilan rendah untuk bekerja dan menghasilkan bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kebanyakan dari mereka ada yang di jadikan sebagai tenaga kerja yang di ekspor keluar negeri ada juga yang di eksploitasi dan di jadikan sebagai

budak seks bagi para pria hidung belang, rata-rata korban dari eksploitasi manusia ini adalah wanita dan anak-anak. Kemudian ada juga yang dikirim ke negara kawasan Timur Tengah, mereka di didik dan di doktrin dengan paham-paham jihadis yang berarti berjuang di jalan Tuhan dan jika mati mereka mati syahid sehingga membuat mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam sepenuhnya karena Indonesia di dominasi oleh masyarakat yang beragama Islam. Lemahnya pengawasan negara di setiap daerahnya membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi untuk melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. Kurangnya pengawalan di daerah perbatasan membuat warga negara asing masuk ke dalam Indonesia sehingga memberikan ancaman bagi warga domestik, ancaman dapat terjadi dalam bentuk apa saja seperti tindak kejahatan, pelecehan seksual, bahkan membuat keributan bisa menjadi ancaman.

Negara Filipina juga tidak jauh beda dengan Indonesia, sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki beberapa pulau kecil, tidak memiliki perbatasan darat, semua akses keluar masuk di Filipina di dominasi oleh jalur maritim sehingga wilayah perbatasan menjadi masalah yang cukup besar bagi Filipina untuk tangani. Masyarakat di Filipina sebagian besar yang bekerja sebagai petani yang tentunya memiliki tingkat perekonomian yang cukup rendah, hal tersebut di dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan demi kepentingan pribadi. Lemahnya pengawasan pemerintah di setiap wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan Filipina juga menjadi salah satu faktor yang menjadikannya atau membuat celah aksi kejahatan dapat dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat di tengah perkembangan dunia yang sangat pesat membuat beberapa masyarakat Filipina lebih memilih jalur praktis untuk mendapatkan keuntungan seperti menjadi tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri melalui jasa yang belum tentu terdaftar dan diakui sebagai penyalur jasa ketenagakerjaan, peredaran narkoba di

Filipina semakin menyebar di akibatkan oleh lemahnya ekonomi warga Filipina sehingga mendorong mereka untuk mengedarkan narkoba di dalam wilayah mereka sendiri. Kurangnya pengawasan terhadap warga yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, membuat segala macam aksi kejahatan juga terjadi di Filipina seperti terdapat persembunyian jaringan-jaringan terorisme internasional di salah satu wilayah di Filipina yaitu Mindanao. Mindanao salah satu wilayah di Filipina yang di dominasi oleh masyarakat beragam Islam atau Muslim, hal tersebut membuat jaringan terorisme yang menganut paham jihadisme menyebarkan paham-paham untuk mendirikan Negara Islam. Dari peristiwa tersebut *Iraq Syiriah of Islam State* (ISIS) dapat mengembangkan jaringannya di Kawasan Asia Tenggara melalui Filipina.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dan Filipina merupakan tindak kejahatan lintas batas negara, persamaan permasalahan yang di miliki oleh Indonesia dan Filipina yaitu permasalahan tentang keamanan masyarakat yang membuat kedua negara untuk membangun ikatan kerjasama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi agar tidak menimbulkan korban atau kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dan Filipina merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi bagian dari kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan obat-obatan terlarang. Namun seiring berjalannya waktu kejahatan-kejahatan tersebut berkembang dan memiliki bentuk serta tujuan yang baru seperti kejahatan di wilayah maritim (perompakan, pembajakan, penyanderaan), korupsi (pencucian uang), kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), penyelundupan senjata ilegal, penyelundupan satwa liar yang dilindungi, kemudian pemalsuan dokumen perjalanan.

Banyaknya peristiwa-peristiwa kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia dan Filipina menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara, hal tersebut mendorong kedua negara untuk melakukan kerjasama antar kepolisian. Dalam sebuah

pertemuan dengan nama *Working Group on Security and Defense, Police and Border Cooperation* menjadi yang pertama kali dilakukan pada tahun 2002 yang membahas tentang adanya aksi penyelundupan senjata api yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Filipina serta membahas beberapa hal yang menunjang dalam kontribusi menjaga dan memelihara keamanan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. *Working Group* tersebut menjadi kerjasama bilateral yang pertama bagi Indonesia dan Filipina dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional di Indonesia dan Filipina.

Kejahatan-kejahatan lintas negara yang terjadi di antara Indonesia dan Filipina semakin bertambah jumlahnya, dalam menanggapi hal tersebut kedua negara kembali melakukan pertemuan untuk membahas tentang penanganan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Pertemuan tersebut membahas penanganan terhadap kejahatan-kejahatan lintas negara atau yang lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2016 di Tangerang, Indonesia. Pada pertemuan tersebut, kedua negara mendiskusikan penanganan kejahatan-kejahatan terjadi sepanjang tahun 2011-2016. Dalam pertemuan tersebut kedua negara setuju untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia dan Filipina seperti :

- Perdagangan Narkoba Ilegal
- Terorisme
- Penyelundupan Manusia
- Penyelundupan Senjata
- Penangkapan Ikan Ilegal, Penipuan Maritim, Perampokan Bersenjata di Laut, Pembajakan di Laut, Kargo Ilegal dan kejahatan laut lainnya
- Kejahatan Dunia Maya
- Pencucian Uang
- Kejahatan Ekonomi Internasional dan Pelanggaran Perbankan
- Pemalsuan Dokumen Kejahatan

- Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan

Bentuk-bentuk kejahatan di atas tertuang dalam MoU yang telah disepakati oleh kedua negara yang bernama *Memorandum of Understanding Between The Indonesian National Police and The Philippine National Police on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime*, di dalam pertemuan tersebut selain membahas tentang pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan transnasional juga membahas tentang implementasi sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional tersebut seperti pertukaran informasi intelijen yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara Indonesia dan Filipina.

Di sepanjang tahun 2011 hingga 2016 banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dan Filipina yang menyebabkan kerugian terhadap kedua negara tersebut. Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di kedua negara serta menjadi pembahasan penulis dalam tulisan ini adalah perdagangan narkoba/obat-obatan terlarang. Perdagangan narkoba di antara kedua negara memang sudah terjadi sejak lama, penyebaran narkoba di Indonesia pada awalnya melalui jalur udara, setelah banyak tertangkapnya pelaku pengedar narkoba menggunakan jalur udara sebagai salah satu cara untuk mengedarkan narkoba di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan penjagaan yang lebih ketat terhadap bandara-bandara yang menjadi titik rawan peredaran narkoba di Indonesia. Beberapa warga Filipina yang tertangkap oleh Kepolisian Indonesia di beberapa tempat seperti di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta pada tahun 2010 yaitu Mary Jane salah seorang warga negara Filipina di tangkap karena membawa narkoba berjenis heroin sebanyak 2,6 kilogram, kemudian tiga warga negara asal Filipina yang bernama Reynaldo Dadula Rebojo, Jillyco Alucudia Cuaycong, dan Alejandro Devocion Caballes yang tertangkap oleh Kepolisian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Indonesia, mereka di tangkap karena membawa narkoba berjenis shabu-shabu sebanyak 15,330 gram.

Peredaran narkoba di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 semakin meningkat. Melihat jalur udara yang dijaga ketat di setiap bandarannya, membuat para pengedar menggunakan jalur laut untuk memasok narkoba-narkoba ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Indonesia dan Filipina yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak jumlah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, membuat para pengedar menggunakan jalur laut untuk mengedarkan narkoba ke setiap daerah di Indonesia dan Filipina. Penggunaan narkoba di Indonesia dan Filipina semakin bertambah dengan di tunjukkan oleh meningkatnya penggunaan narkoba, jika dahulu yang menggunakan narkoba hanya orang-orang yang memiliki emosi dan mental yang tidak stabil serta orang-orang yang mengalami depresi akibat permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, kini narkoba telah digunakan oleh orang-orang yang berasal dari kaum moderat dan beruang, bahkan narkoba telah digunakan di kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa. Penggunaan narkoba di kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa biasanya di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, karaoke, hingga tempat-tempat yang di memiliki kualitas *privacy* yang tinggi.

Selain memiliki hubungan kerjasama bilateral, Indonesia dan Filipina juga tergabung dalam organisasi internasional di Kawasan Asia Tenggara serta menjalin kerjasama dengan organisasi tersebut yaitu *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Salah satu pertemuan kerjasama kepolisian yang dihadiri oleh Kepolisian Indonesia dan Filipina adalah *ASEAN National Police* (ASEANAPOL). ASEANAPOL sebagai lembaga yang menaungi kepolisian dari setiap negara di ASEAN yang bertujuan untuk memudahkan proses mendeteksi dan menjaring penjahat internasional baru yang berkeliaran di Kawasan Asia Tenggara. Pada pertemuan ASEANAPOL yang dilakukan tahun 2012 di Myanmar membahas tentang upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang juga terjadi di Indonesia dan Filipina, langkah-langkah yang di lakukan ASEANAPOL dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional adalah dengan melakukan pertukarang informasi

intelijen serta sumber-sumber data kriminal secara cepat dan tepat, *hot pursuit* terhadap para penjahat lintas batas negara, pertukaran personil dalam rangka mengenal dan menimba pengalaman satu sama lain di bidang teknologi dan pendidikan.

Selain tergabung dalam anggota ASEANAPOL, Indonesia dan Filipina juga tergabung dalam beberapa organisasi kerjasama yang di bentuk oleh ASEAN seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Beberapa organisasi internasional tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan dan cara penanganan kejahatan transnational yang sama dengan ASEANAPOL, namun ada beberapa tujuan utama dan implementasi dari bentuk pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan transnasional dari setiap organisasi internasional tersebut yang berbeda.

Selanjutnya adalah implementasi dari Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Narkoba Di Indonesia Dan Filipina melalui kerjasama bilateral antara kepolisian yang memiliki 4 (empat) cara yaitu dengan melakukan pertukaran informasi intelijen, melakukan kegiatan polisi bersama yang terkoordinasi, melakukan pertukaran personil untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan dan teknologi, serta membentuk suatu komite bersama. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia-Filipina sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia dan Filipina.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran dan perdagangan nakorba sebagai kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia dan Filipina melakukan 3 (tiga) tindakan utama yaitu, yang pertama Kepolisian Indonesia dan Filipina melakukan pertukaran informasi intelijen, pertukaran informasi yang dilakukan oleh kepolisian kedua negara ada informasi berupa data-data kejahatan yang terjadi di antara kedua negara, kemudian data-data pelaku yang melakukan aksi

kejahatan perdagangan narkoba di Indonesia dan Filipina, serta kerugian yang di timbulkan dari adanya aksi kejahatan tersebut.

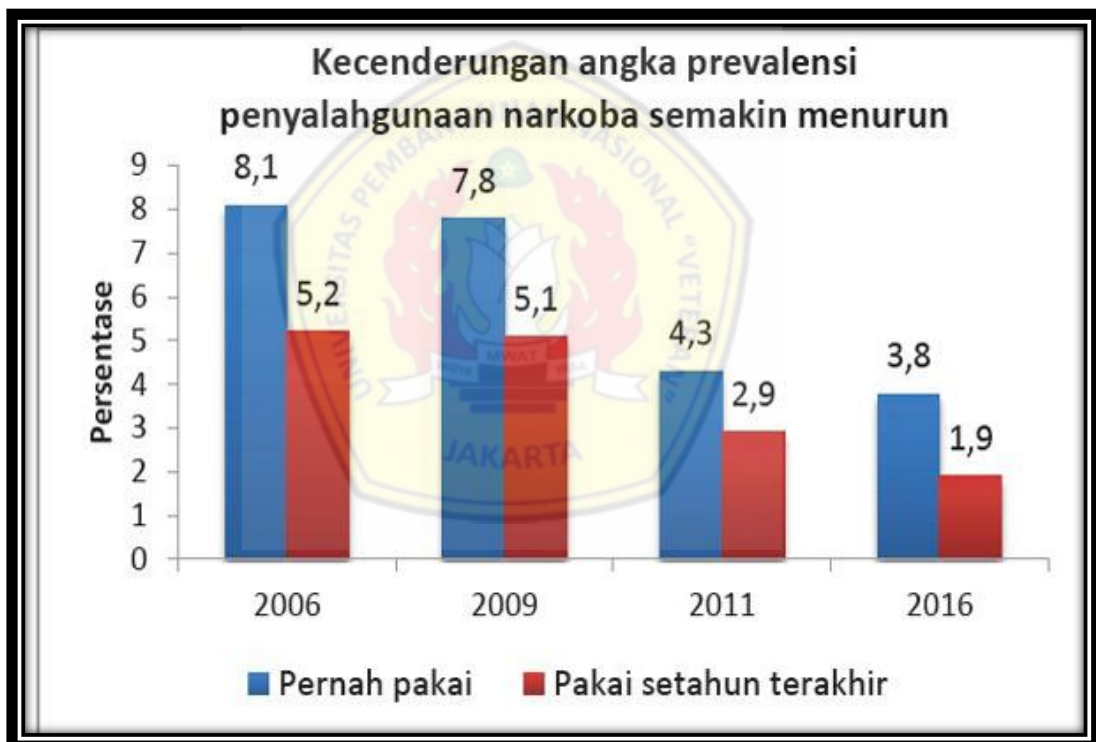
Yang kedua, Kepolisian Indonesia dan Filipina melakukan kegiatan polisi bersama yang terkoordinasi, kegiatan ini berupa patroli bersama di wilayah-wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan garis wilayah antara Indonesia dan Filipina, patroli bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan sehingga dapat mencegah peningkatan angka terjadinya aksi kejahatan transnasional di setiap waktunya. Penangkapan Diama Panesilang di Sulawesi Utara pada tahun 2015 sebagai salah satu warga negara Filipina yang membawa paket shabu merupakan hasil dari salah satu bentuk implementasi kerjasama Indonesia dan Filipina dalam mencegah dan memberantas kejahatan di Indonesia dan Filipina yaitu patroli polisi bersama terkoordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia dan Filipina.

Yang ketiga, Kepolisian Indonesia dan Filipina juga melakukan pertukaran personil untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan teknologi. Dalam menciptakan situasi yang aman dan tentram, polisi juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman seperti kemajuan teknologi dan kemajuan pendidikan. Kemajuan teknologi pada saat ini bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, oleh karena itu dengan melakukan pertukaran personil yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi dan pendidikan diharapkan dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi serta kejahatan yang semakin lama semakin berkembang pola dan bentuknya.

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina melalui kerjasama antara kepolisian dari kedua negara menunjukkan perubahan yang sangat spesifik pada tahun 2016, hal tersebut di tunjukkan dengan penurunan terhadap penggunaan narkoba di Indonesia dan Filipina. Tahun 2016 menjadi tahun yang baru bagi Indonesia dan Filipina dalam mencegah dan memberantas peredaran dan perdagangan narkoba. Di Indonesia pengurangan dan penurunan terhadap pemakaian narkoba

berdasarkan hasil survei BNN berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa. Penurunan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh intensifnya penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi narkoba yang dilakukan oleh BNN dan pihak pemerintah kepada setiap sekolah dan universitas yang ada di Indonesia serta peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Penyuluhan tentang sanksi-sanksi tentang narkoba yang akan mereka hadapi setelah terbukti menggunakan dan menjadi pengedar narkoba juga ikut dijelaskan sehingga kelompok pelajar dan mahasiswa terhindar dan tidak terjerumus dalam dunia kelim tersebut.

Grafik Penurunan Penggunaan Narkorba Di Indonesia

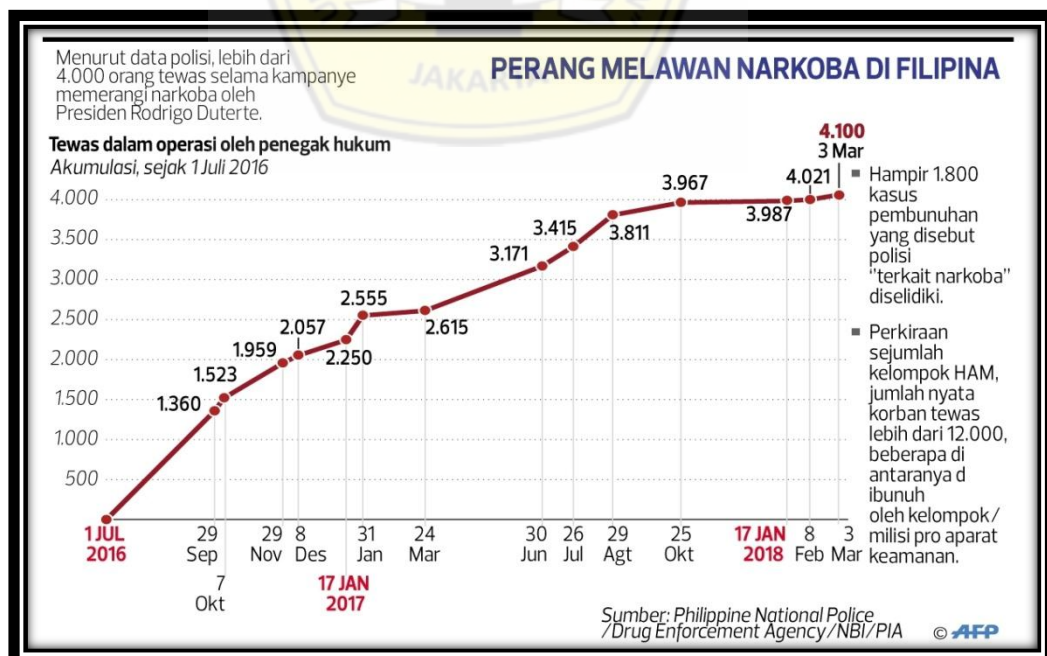


Sumber: <http://www.erabaru.net/2017/03/04/selama-2016-penyalahgunaan-narkoba-terjadi-pada-4-dari-100-pelajarmahasiswa/> (Selama 2016, Penyalah Gunaan Narkoba Terjadi Pada 4 dari 100 Pelajar/Mahasiswa)

Negara Filipina juga mengalami penurunan terhadap penggunaan dan pengedaran narkoba, hal tersebut disebabkan oleh Negara Filipina yang baru melantik presidennya yaitu Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte yang resmi dilantik 30 Juni 2016 sebagai Presiden Negara Filipina tersebut menerapkan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk memerangi narkoba di

Filipina, kebijakan-kebijakan Duterte yang paling terkenal dalam memerangi narkoba adalah menembak mati di tempat untuk bandar narkoba, warga sipil diperbolehkan untuk ikut menembak bandar narkoba, melibatkan militer dalam memerangi bandar narkoba, dan Duterte ingin meng-eksekusi mati paling tidak 5 (lima) hingga 6 (enam) orang penjahat narkoba perharinya. Kebijakan-kebijakan yang di buat oleh Presiden Negara Filipina tersebut membuat pro dan kontra terhadap pendapat dunia, banyak pihak yang mengecam kebijakan-kebijakan tersebut, *United Nation* (UN) atau yang biasa disebut sebagai Perkumpulan Bangsa-Bangsa (PBB) salah satu pihak yang tidak setuju serta mengecam kebijakan Duterte tersebut, kebijakan-kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan HAM yang berlaku walaupun kritik dan komentar pedas banyak yang datang kepadanya terkait kebijakan-kebijakan Duterte dalam memerangi narkoba di Filipina dinilai tidak berperikemanusiaan dan kejam, Duterte tetap menjalankan kebijakannya.

Grafik Akumulasi Peningkatan Korban Tewas Dalam Perang Melawan Narkoba Di Filipina



Sumber: <http://www.harnas.co/2018/03/14/filipina-tinggalkan-icc> (Harian Nasional: Filipina Tinggalkan *International*

Chamber of Commerce [ICC])

Meskipun dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 kenaikan dan peningkatan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang di Indonesia dan Filipina yang disebabkan oleh lemahnya hukum dan pengawasan dari pihak aparat keamanan atau kepolisian yang berlaku pada masa itu masih sangat kurang dan terbatas, namun di tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis terhadap peredaran dan penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang di Indonesia dan Filipina, hal tersebut tak luput dari upaya kedua negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba melalui kerjasama kepolisian antara Indonesia dengan Filipina. Berdasarkan dan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini bahwa Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba/Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016 dinyatakan berhasil.

VI.2 SARAN

Meskipun kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia dan Filipina dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan narkoba/obat-obatan terlarang di kedua negara telah berhasil menurunkan tingkat penggunaan dan peredaran narkoba di kedua negara namun tidak bisa menghentikan peredaran dan penggunaan narkoba di kedua negara tersebut hilang seketika, masih banyak beberapa pihak-pihak yang menjalankan bisnis narkoba di tempat-tempat yang terisolir, walaupun peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia dan Filipina saat ini tidak seburuk pada tahun-tahun sebelumnya, tentu masih menjadi ancaman dan 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan oleh kedua negara agar tidak menimbulkan kerugian, ancaman, serta kecemasan bagi masyarakat dan negara yang bersangkutan.

Melihat hambatan-hambatan yang di alami oleh kedua negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transansional khususnya perdagangan narkoba/obat-obatan terlarang, Kepolisian Indonesia dan Filipina dapat meningkatkan kualitas kerjasama di antara keduanya seperti :

1. Kepolisian Indonesia dan Filipina harus lebih kooperatif dan sering bertukar informasi baik berupa data kejahatan, data pelaku kejahatan, dan data isu-isu kejahatan yang menyebar di masyarakat. Karena selama ini Kepolisian Filipina kurang berkoordinasi kepada Kepolisian Indonesia terhadap kasus-kasus yang menimpa warga negaranya yang sedang berada di Indonesia.
2. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban di wilayah-wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Kepolisian Indonesia dan Filipina seharusnya lebih sering melakukan operasi patroli bersama yang tidak hanya dilakukan paska atau setelah suatu aksi kejahatan terjadi, bahkan kegiatan patroli bersama harus dilakukan dengan waktu yang intensif, mengingat kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Seiring berjalannya waktu teknologi bertumbuh dan berkembang, begitu juga pola kejahatan yang semakin hari semakin bertambah. Kemajuan teknologi pada saat ini sangat menunjang aksi kejahatan untuk dapat dilakukan, oleh karena itu pengawasan dan penertiban wilayah-wilayah perbatasan harus lebih di perketat atau diperkuat.
3. Kebijakan Negara Filipina dalam memerangi dan melawan narkoba seharusnya tidak menggunakan cara yang kejam seperti menembak atau membunuh para bandar dan pengguna narkoba agar tidak menimbulkan kecaman dan keresahan bagi warga

Negara Filipina itu sendiri. Lebih baik para bandar dan pengguna narkoba itu di tangkap dan diberi hukuman namun hukuman yang diberikan harus lebih berat dari yang sebelumnya, tetapi tidak harus membunuhnya. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Filipina berhasil menurunkan tingkat pengedar dan penggunaan narkoba di Filipina itu sendiri, namun setiap manusia yang lahir di dunia ini telah mempunyai haknya sebagai warga negara semenjak dilahirkan.

4. Langkah Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus narkoba sudah cukup bagus, tetapi masih banyak pengedar dan pengguna narkoba yang masih berkeliaran, hal tersebut disebabkan oleh minimnya informasi yang di dapatkan oleh Kepolisian Indonesia. Indonesia harus lebih tegas lagi dalam menindak pengedar dan pengguna narkoba, kekuatan hukum di Indonesia saat ini masih lemah terhadap golongan-golongan atas atau pejabat, hukum di Indonesia saat ini masih bisa di bilang lemah jika di hadapkan dengan uang sehingga banyak pengedar dan pengguna narkoba dari golongan atas pejabat ketika tertangkap dalam suatu operasi jaringan narkoba yang di lakukan oleh kepolisian dapat lolos atau keluar dari hukuman dan kurungan penjara.

5. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Filipina harus tetap berlangsung hal tersebut dibutuhkan karena kerjasama yang di bangun oleh kedua negara tidak hanya di bidang keamanan saja melainkan di bidang ekonomi dan politik. Meskipun begitu Kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional melalui kerjasama antar kepolisian dari kedua negara juga harus tetap berjalan baik, karena bagaimanapun juga Indonesia dan Filipina merupakan negara tetangga yang sama-sama memiliki wilayah-

wilayah yang dikelilingi oleh perairan. Kepolisian Indonesia dan Filipina juga harus lebih sering melakukan pertukaran personil agar sumber daya pengetahuan di bidang pendidikan dan teknologi serta strategi yang dimiliki oleh masing-masing personil semakin meningkat dan bertambah.

